

Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

Ratih Permata Sari
IAI Al Qolam Malang
ratihpspaud@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode survei. Hasil peneliti meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.

Kata Kunci: Akreditasi, Mutu PAUD

PENDAHULUAN

Keberhasilan program PAUDNISASI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla (SBY-JK) memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan akses dan layanan PAUD di Indonesia. Komitmen tersebut dilaksanakan secara baik oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Ditjen PAUD dan Dikmas sejak tahun 2010-2015 dalam rangka menunjang visi Indonesia Emas 2045. Cita-cita tersebut dilatarbelakangi dengan adanya bonus demografi terhitung sejak tahun 2010-2035 (data proyeksi BPS: 2010) dengan kesimpulan bahwa untuk mempersiapkan Indonesia EMAS 2045 program penguatan yang pertama dan utama adalah pada pendidikan anak usia dini. Generasi masa depan terlahir sebagai anak-anak yang sejak dini memerlukan perhatian yang khusus untuk mengembangkannya. Ini disebabkan karena mereka belum mampu untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Baik itu secara psikologis, paedagogik, sosiologis, maupun secara yuridis. Oleh karena itu diperlukan berbagai pranata kehidupan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki.

Nalar berfikir seperti ini cukup rasional, sebab pendidikan anak usia dini merupakan investasi dan pondasi dasar pembangunan nasional yang beradab. Apabila kemas pendidikan anak usia dini baik, maka cita-cita Indonesia EMAS 2045 akan tercapai, kondisi sebaliknya, bila pendidikan anak usia dini tidak diperhatikan dengan baik, maka berdampak pada bencana demografi. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan mutu lembaga PAUD adalah dengan program akreditasi.

Akreditasi adalah suatu mekanisme penilaian yang dilakukan oleh lembaga/institusi/perorangan yang menilai tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dokumen/program lembaga dengan menggunakan suatu kriteria standar tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dengan akreditasi, lembaga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan dan menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu.

Upaya mengembangkan pendidikan yang bermutu bukanlah hal yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis, penuh tantangan dan butuh komitmen yang tinggi dari seluruh komponen bangsa. Mutu pendidikan senantiasa menjadi fokus perhatian, bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat, karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa sekarang akan tetapi menyangkut kehidupan dan kondisi sosial yang akan datang.

Satuan PAUD sebagai lembaga sosial yang merupakan suatu institusi publik yang bertujuan untuk mewujudkan dan menghasilkan insan bertakwa dan mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia. Sebagai suatu lembaga publik tentunya lembaga tersebut harus akuntabel, transparan, terbuka, dapat dinilai oleh pihak internal dan eksternal, termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja lembaga pendidikan tersebut haruslah mempunyai indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya.¹ Satuan PAUD sebagai suatu lembaga pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, serta perlu dikelola secara profesional dengan sistem kinerja terukur sehingga mudah diketahui sejauhmana telah mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi PAUD merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (self-regulation) agar satuan PAUD mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya.

Untuk menghadapi proses akreditasi tersebut, tantangan dan sekaligus kendala yang dihadapi satuan pendidikan anak usia dini (selanjutnya disebut Satuan PAUD) di masyarakat adalah strategi dan teknis didalam menyusun naskah/dokumen borang akreditasi, sebagai bagian dari persyaratan umum dan khusus yang wajib terpenuhi dalam akreditasi. Sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini antara lain: standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Ke-delapan point standar nasional PAUD tersebut harus diterjemahkan oleh satuan PAUD menjadi naskah/dokumen borang akreditasi lembaga yang memberikan informasi tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dari setiap dokumen ataupun program yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pendampingan dan penjelasan teknis terkait proses akreditasi tersebut, satuan PAUD membutuhkan tenaga profesional yang berasal dari akademisi dan praktisi.

Dari data tersebut bahwa lembaga yang telah terakreditasi B bukan berarti lembaga tersebut bagus melainkan lembaga tersebut perlu di evaluasi agar lembaga tersebut tetap mempertahankan status akreditasinya dan melakukan perbaikan 8 standar yang disesuaikan dengan kondisi lembaganya. Sedangkan lembaga yang berstatus terakreditasi C perlu bekerja keras untuk melakukan perbaikan demi mutu pendidikan dan kualitas lembaganya.

Atas dasar itu, kedudukan akreditasi dalam proses manajemen penyelenggaraan pendidikan adalah memberikan gambaran nyata tentang kondisi satuan PAUD sebagai bahan untuk terus berupaya meningkatkan layanan pendidikan berkualitas, serta sejauh mana satuan PAUD yang terakreditasi memanfaatkan hasil akreditasi untuk peningkatan mutu. Bertolak dari permasalahan di atas, untuk melihat pemanfaatan akreditasi terhadap perbaikan mutu PAUD, maka perlu dilakukan kajian melalui penelitian dengan judul “ Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang”.

Dari data tersebut kami sebagai peneliti ingin mengetahui salah satu lembaga yang sudah terakreditasi di kabupaten malang yaitu PAUD Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang yang status akreditasinya B setelah mengajukan akreditasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan lembaganya.

Persoalan tentang mutu pendidikan anak usia dini menjadi pondasi dasar di dalam menciptakan manusia Indonesia yang unggul, bermoral dan berkarakter. Untuk menjawab

¹ H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), p. 105

permasalahan tersebut salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan. Dengan adanya pemisahan jenjang pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdiri dari jenjang, jalur, dan jenis pendidikan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Secara umum mutu diartikan dengan derajat keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa dalam bentuk yang *tangible* maupun yang *intangible*. Ada beberapa pandangan tentang mutu, bahkan bukan tidak mungkin setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya seseorang melihat layanan pendidikan suatu satuan PAUD dinilai bermutu dilihat dari aspek mutu gurunya, fasilitas yang tersedia, bayarannya murah, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang lainnya, suatu barang atau jasa dikatakan bermutu jika memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu, misalnya memiliki keunggulan akan tetapi diperolehnya dengan biaya murah.

Menurut Deming yang dikutip Arcaro, mutu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar digunakan dan memiliki ketergantungan pada biaya yang rendah.² Hal ini mengandung pengertian bahwa dengan mengontrol suatu output pendidikan akan berfungsi untuk perbaikan program berkelanjutan. Prinsip pokok yang perlu diterapkan dalam pendidikan adalah perumusan tujuan satuan PAUD yang jelas sebagai upaya untuk mencegah kegagalan dalam proses peningkatan mutu melalui penggunaan metode yang ketat untuk memperbaiki output satuan PAUD tersebut.

Menurut Sallis, pengertian mutu dapat ditinjau dari dua pendekatan konsep. Konsep pertama, mutu bersifat absolut dan konsep kedua, mutu bersifat relatif.³ Mutu bersifat absolut, yaitu ditandai dengan tingginya kualitas prestasi siswa yang dihasilkan oleh suatu instansi pendidikan. Sedangkan mutu bersifat relatif, yaitu derajat mutu yang tergantung pada penilaian pelanggan. Mutu bersifat absolut ini membawa implikasi bahwa dalam memproduksi barang atau jasa digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu ditentukan oleh produsen atau pemasok barang. Sedangkan dalam konteks proses pendidikan mutu mengacu kepada seluruh komponen satuan PAUD termasuk sumber daya manusia, manajemen satuan PAUD, bahan ajar, metodologi, sarana prasarana satuan PAUD, dukungan administrasi, dukungan stakeholder dan sumber daya lain serta penciptaan suasana yang pembelajaran di satuan PAUD yang kondusif.

Berbeda halnya dengan pandangan masyarakat secara umum, bahwa mutu satuan pendidikan adalah keunggulan yang dimiliki oleh satuan pendidikan tertentu yang dilihat dari ukuran fisik, seperti gedung dan jumlah ekstra kurikuler yang disediakan, ukuran layanan, ukuran biaya, ukuran pendidik dan tenaga kependidikan. Ada pula masyarakat yang berpendapat bahwa kualitas satuan PAUD dapat dilihat dari jumlah lulusan yang diterima di jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan demikian pengertian mutu kaitannya dengan program pendidikan adalah menjadi prioritas utama bagi setiap lembaga satuan pendidikan. Mutu pendidikan dimaknai sebagai upaya menghasilkan produk (*output*) pendidikan yang memiliki nilai manfaat tinggi yang berorientasi pada tuntutan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.

Secara umum mutu pendidikan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: 1) Mutu *Input* meliputi ketersediaan buku teks/ buku wajib sebagai prasyarat penunjang dalam menyediakan materi pembelajaran., tampaknya belum cukup memadai dari segi jumlah dan penyebarannya, serta kualitas isi materi yang dimuat. Disamping itu, ketersediaan guru, kesesuaian guru dengan mata pelajaran yang diajarkan, serta kemampuan guru secara umum masih jauh dari yang diharapkan, 2) Mutu *Output* dapat ditunjukkan dengan prestasi

² Jerome, S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p. 7.

³ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (London: Kogan Page Ltd, 1993), p. 57.

akademik bukan satu-satunya tolak ukur dalam menentukan mutu output, namun dari hasil paparan diatas menunjukkan bahwa secara akademis, tingkat penguasaan materi pada umumnya sangat memprihatinkan. Disamping itu dilihat dari prestasi akademik tampak pula bahwa sebagian besar satuan PAUD tergolong dalam klasifikasi kurang dan kurang sekali, dan 3) Mutu *Outcome* yakni gambaran keberhasilan proses pendidikan dalam mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, mengingat tidak adanya kriteria kelulusan sebagai prasyarat untuk memperoleh sertifikasi dari suatu jenjang pendidikan. Dengan demikian standar mutu satuan PAUD yang diharapkan antara lain:

a. Kualitas Kurikulum

Kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu satuan pendidikan yang meliputi muatan pelajaran-pelajaran yang harus ditempuh di satuan PAUD. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum diperoleh dari hasil pengalaman-pengalaman di kelas yang mengalami proses perubahan kearah perbaikan yang kemudian diterapkan kembali untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih dari kondisi sebelumnya, sehingga bermakna untuk diterapkan dalam kehidupan siswa di satuan PAUD maupun kehidupan siswa dalam masyarakat. Dari makna yang terkandung dalam rumusan tersebut, maka kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah.⁴

Dengan demikian, kurikulum adalah suatu perangkat yang sengaja direncanakan dan didesain sebagai landasan formal dan instruksional dalam proses pendidikan yang memuat suatu kesatuan mata pelajaran. Sehingga kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu, sebagai ilmu (*curriculum as a body of knowledge*), sebagai sistem (*curriculum as a system*) dan sebagai rencana (*curriculum as a plan*). Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya.

b. Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan

Guru adalah salah satu profesi yang khusus diangkat dengan tugas mengajar dan mendidik pada satuan pendidikan anak usia dini. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang mempunyai kompetensi mengajar secara sistematis mulai merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pasal 2 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Perbaikan kinerja guru dapat dianalisis melalui beberapa kriteria, antara lain: (1) rencana pembelajaran (*teaching plans and materials*) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran (*classroom procedure*), dan (3) hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*).⁵ Penilaian terhadap kinerja guru juga dapat

⁴ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Satuan PAUD* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), p. 4.

⁵ Direktorat Tenaga Kependidikan. *Penilaian Kinerja Guru* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008),

diukur melalui delapan indikator, seperti: (1) pengelolaan waktu pembelajaran, (2) pengelolaan perilaku siswa, (3) penyajian pembelajaran, (4) monitoring pembelajaran, (5) umpan balik, (6) memfasilitasi pembelajaran, (7) komunikasi dalam lingkungan pendidikan, (8) melakukan tugas-tugas *noninstruksional*.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru adalah sebagai keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu, meliputi aspek: kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan metode pembelajaran, menguasai bahan pelajaran dan menggunakan sumber belajar, bertanggung jawab memantau hasil belajar mengajar, disiplin dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam melaksanakan pengajaran, melakukan interaksi dengan murid untuk menimbulkan motivasi, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukan, serta paham dalam administrasi pembelajaran.

Tugas guru tentu berbeda dengan tugas tenaga kependidikan. Dari definisi saja berbeda dimana, tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan administrasi pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pelayan, pengelola atau administrator pendidikan. Kaitannya dengan pelayanan pendidikan di satuan PAUD, peran tenaga administrasi pendidikan dalam manajemen satuan PAUD belakangan ini semakin penting. Pada masa lalu, tenaga administrasi satuan PAUD berfungsi sebagai juru kelola administrasi satuan PAUD yang berkaitan dengan pengelolaan data siswa, data pendidik dan tenaga kependidikan, persuratan, arsip, administrasi sarana prasarana, dan administrasi keuangan.

Pada dasarnya tugas tenaga administrasi satuan PAUD adalah membantu: (1) proses belajar mengajar, (2) urusan kesiswaan; (3) kepegawaian, (4) peralatan satuan PAUD, (5) urusan infrastruktur satuan PAUD, (6) keuangan, (7) bekerja di laboratorium, (8) perpustakaan dan (9) hubungan masyarakat. Sedangkan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan untuk satuan PAUD tenaga administrasi satuan PAUD berfungsi untuk memberikan pelayanan prima di bidang administrasi. Pelayanan prima yang dimaksud adalah baik dalam arti sebenarnya maupun dalam arti singkatannya. Adapun singkatan dari pelayanan prima adalah (1) pantas, (2) empati, (3) langsung, (4) akurat, yakin, aman, nyaman, alat, nyata, perkataan, rahasia, informasi, mudah, dan ahli.

c. Sarana dan Prasarana

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, sarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan PAUD meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan PAUD meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan, sedangkan standar jumlah buku teks pelajaran dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan PAUD dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap siswa sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan PAUD.

Lahan untuk bangunan satuan PAUD, lahan praktek, lahan untuk sarana penunjang, dan lahan pertanaman untuk menjadikan satuan PAUD suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Standar lahan satuan PAUD dinyatakan dalam rasio luas lahan per siswa, sedangkan standar letak lahan satuan PAUD mempertimbangkan letak lahan satuan PAUD di dalam klaster satuan PAUD sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan PAUD di dalam klaster satuan PAUD yang menjadi pengumpulan masukan siswa. Letak lahan juga harus mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh siswa untuk menjangkau satuan PAUD, dan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, serta kesehatan lingkungan.

d. Pembiayaan

Mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional dalam ketentuan standar pembiayaan satuan PAUD bahwa biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.⁶ Biaya investasi satuan PAUD meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan PAUD meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

e. Dukungan Orangtua Siswa dan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Satuan PAUD di tingkat satuan pendidikan.

Dewan Pendidikan dan Komite Satuan PAUD merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan satuan PAUD maupun luar satuan PAUD.

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak satuan PAUD, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*community-based participation*) dan manajemen berbasis satuan PAUD (*school-based management*), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia. Pada setiap penyelenggaraan pendidikan, peran serta masyarakat sangat diperlukan agar kondisi dapat memenuhi standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi masyarakat juga sering diwujudkan dengan keikutsertaan para orang tua dalam kegiatan lain di satuan PAUD yang terorganisir di dalam komite satuan PAUD.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dikatakan

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62, ayat 1.

bahwa komite satuan PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.⁷ Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Satuan PAUD. Komite Satuan PAUD adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan PAUD, jalur pendidikan satuan PAUD maupun jalur pendidikan luar satuan PAUD.⁸ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, dikatakan bahwa komite satuan PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas satuan PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite satuan PAUD dibentuk dan berperan dalam: (1) pemberian pertimbangan (*advisory*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan PAUD, dan (2) pendukung (*supporting*) berupa finansial, pemikiran dan tenaga. Komite satuan PAUD bertujuan: (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan PAUD, (2) meningkatkan tanggung jawab peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan PAUD, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan PAUD.

f. Dukungan Manajemen Satuan PAUD

Selaras dengan reformasi pendidikan, pengelolaan pendidikan yang kini diperkenalkan pada dunia pendidikan sebagai pilihan untuk mengembangkan satuan PAUD adalah menggunakan manajemen berbasis satuan PAUD (*School-Based Management*). Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang menggunakan manajemen berbasis satuan PAUD yang sekarang lebih dikenal dengan manajemen mutu total (TQM), dimana didalam Manajemen Mutu Total menggunakan suatu metodologi yang mempermudah mengelola perubahan, membentuk focus perubahan dan mengelola perubahan yang fleksibel untuk cepat merespon pada tuntutan perubahan masyarakat. Manajemen mutu total yang dilakukan di Pendidikan berbeda dengan perusahaan bisnis, di pendidikan yang di proses adalah manusia, yang mempunyai berbagai latar belakang kehidupan tetapi ingin maju dan ingin belajar.

Manajemen Berbasis Satuan PAUD diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah ke satuan PAUD dengan pemberdayaan satuan PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.⁹ Ini berarti satuan PAUD memiliki wewenang yang lebih leluasa dalam mengelola pendidikan, sehingga akan lebih mandiri dan dapat lebih mengembangkan program-program sesuai dengan ciri khas satuan PAUD, kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Jadi Manajemen Berbasis Satuan PAUD (MBS) adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat satuan PAUD. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana satuan PAUD merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, ayat 25.

⁸ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Satuan PAUD, <http://rastodio.com/wp-content/uploads/2009/08/Kepmendiknas-044-2002.pdf> (diakses 11 Februari 2011).

⁹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 153.

kesempatan pengendalian lebih besar kepada kepala satuan PAUD, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di satuan PAUD mereka.

Target dan Luaran

a. Target

Melalui hasil penelitian ini warga satuan PAUD memiliki kontribusi yang sama dalam peningkatan mutu lembaga sehingga secara operasional warga satuan PAUD tersebut memahami kebijakan, mekanisme, dan prosedur penyelenggaraan dan dampak dari program akreditasi satuan PAUD di Indonesia.

b. Luaran

Hasil dari penelitian ini adalah pengelola satuan PAUD memiliki data dasar dalam pemetaan mutu lembaga sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan tentang Akreditasi PAUD di Indonesia dan sebagai bagian dari tanggungjawab tridarma dan bentuk pelaporan satuan PAUD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode survei. Metode survei adalah metode penelitian ilmiah yang memakai angket atau kuesioner sebagai instrumen pokok untuk mengumpulkan data.¹⁰ Metode survei dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan komponen-komponen dan aspek-aspek yang dievaluasi secara sistematis, faktual, dan akurat.¹¹

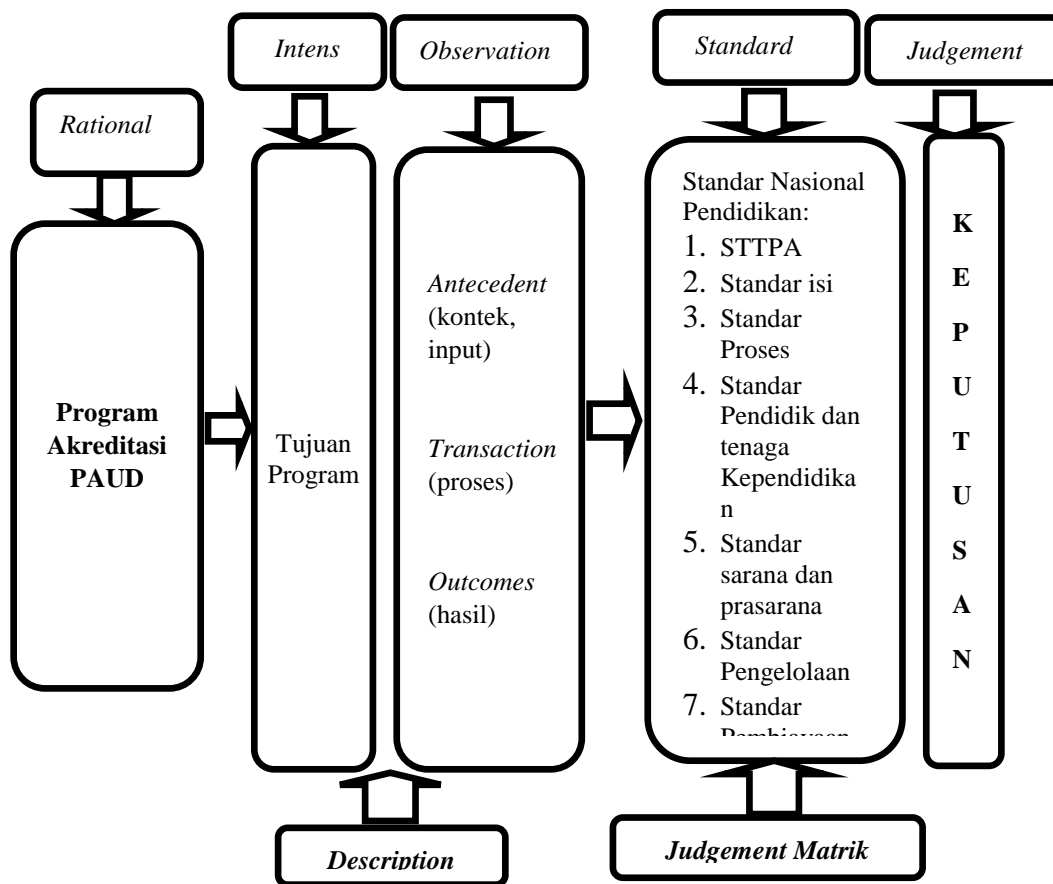
Metode penelitian survei dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi manakala suatu program sedang berlangsung atau sudah selesai. Penelitian evaluatif yang memakai metode survei terdiri dari dua tahap, yaitu tahap teoretisasi dan tahap empirisasi. Tahap teoretisasi berupa pengkajian teoretis tentang unsur-unsur penelitian dan substansi objek yang diteliti. Sementara itu, tahap empirisasi merupakan proses penelitian di lapangan untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisisnya.¹²

Dengan metode ini diharapkan: (1) Menghasilkan deskripsi detail dari dampak akreditasi terhadap mutu PAUD, (2) mengevaluasi tata kelola mutu PAUD, dan (3) Menghasilkan rekomendasi berkaitan dengan mutu PAUD di Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah riset evaluasi kualitatif dengan menggunakan Countenance Evaluation oleh Stake yang menekankan adanya dua hal pokok, yaitu: (1) deskripsi (description) dan (2) pertimbangan (judgements), serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) anteseden (antecedent/context), (2) transaksi (transaction/process), dan (3) keluaran (output-outcomes). Untuk lebih jelasnya dapat divisualisasikan seperti berikut:

¹⁰ Masri Singarimbun, "Metode dan Proses Penelitian" dalam Metode Penelitian Survei, ed. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Jakarta: LP3ES, 1995), p. 3.

¹¹ Djudju Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Satuan PAUD (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Remaja Rosdakarya, 2006), p. 107 dan 145.

¹² Sofian Effendi, "Unsur-unsur Penelitian Survei" dalam Metode Penelitian Survei, ed. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Jakarta: LP3ES, 1995), p. 31.



Gambar 3.1

Alur Penelitian Evaluasi Program yang dikembangkan oleh Stake

a. Subyek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di satuan PAUD di Kabupaten Malang yang sudah terakreditasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Subjek penelitian ini diambil secara purposif dan disesuaikan dengan fokus dan lokus evaluasi program.

b. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain, termasuk diantaranya sumber data tertulis, dokumen rekaman suara dan foto serta data statistik.¹³ Sementara itu instrumen pengumpulan data penelitian adalah “manusia” yaitu peneliti, didukung oleh asisten peneliti yang mampu mengumpulkan data yang diperlukan. Didalam pengumpulan data, prosedur yang digunakan adalah Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan infoirmasi dengan membuat sejumlah pertanyaan yang harus di isi oleh informan berdasarkan pada komponen dan indikator evaluasi bersangkutan.

c. Teknik Analisis Data

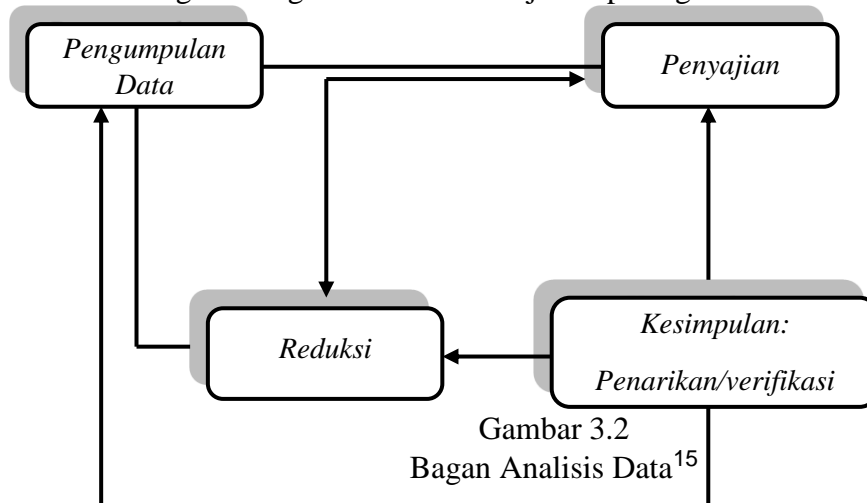
Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis-lah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif data yang akan dianalisis berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Untuk analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan

¹³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), p.157

Huberman seperti dikutip oleh Yatim Riyanto, dapat dilakukan dengan menempuh langkah berikut yaitu reduksi data, *display* data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan.¹⁴

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan begitu dalam reduksi ini ada proses *living in* (data yang terpilih dan diambil) dan *living out* (data yang dibuang). *Display* data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, tabel, metrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Sedangkan *verifikasi data* merupakan pengecekan kembali terhadap simpulan-simpulan yang sudah diambil sebelumnya. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah membuat simpulan-simpulan sementara. Simpulan tersebut kemudian diverifikasi pada catatan yang sudah dibuat, untuk selanjutnya mengarah ke simpulan yang mantap.

Langkah terakhir yang ditempuh dalam analisis data ini adalah *mengambil kesimpulan* yang merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul ke dalam pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Penarikan simpulan diawali dengan simpulan tentatif yang belum sempurna. Setelah data yang masuk terus-menerus dianalisis dan diverifikasi kebenarannya akhirnya didapatkan kesimpulan akhir yang lebih bermakna dan jelas. Simpulan pada dasarnya merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan dibuat relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan penemuan yang sudah diinterpretasi dalam pembahasan. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:



Menurut Miles dan Huberman dalam pengkajian kualitatif, analisis data tidak mempunyai patokan yang jelas, oleh karena itu memungkinkan terjadi munculnya pendapat pribadi yang tidak relevan dengan data yang ada. Analisis data cenderung merupakan kiat serta mengandalkan intuisi peneliti.¹⁶ Sementara menurut Patton¹⁷, langkah pertama dalam analisis data kualitatif adalah analisis deskriptif yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar,

¹⁴ Matthew B. Miles and Michael A. Huberman. *Qualitatif Data Analysis* (London: Sage Publication, 1994), p. 11.

¹⁵ Matthew Miles dan Michael Huberman, *op.cit.*, p. 20.

¹⁶ *Ibid.*, 12

¹⁷ Michael Quinn Patton, *Qualitatif Evaluation and Research Methods* (California: Sage Publication, 1987), p. 371.

berikut memastikan bahwa semua data yang dibutuhkan sudah lengkap dan kualitasnya sudah diperiksa terlebih dahulu, kemudian kesenjangan data diisi, baru kemudian dilakukan analisis secara formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Belajar Mengajar

No.	Kegiatan Pembelajaran	Uraian
1.	Perencanaan pembelajaran dengan bentuk pembelajaran	Program 1 Tahun Program Semester RKM RKH
2.	Pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang digunakan	Kelompok

1. Visi dan Misi Lembaga PAUD

a. Visi

Membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil berakhlak mulia, sholeh/sholihah sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan inovatif.
- 2) Mendidik anak secara optimal sesuai dengan kemampuan anak.
- 3) Menyiapkan anak didik ke jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian Kompetensi Dasar sesuai tahapan perkembangan anak.

c. Tujuan

- 1) Mengembangkan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang inovatif
- 2) Mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
- 3) Menyiapkan anak didik memasuki jenjang pendidikan dasar dengan ketercapaian kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak.
- 4) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam mengelola pendidikan yang menyenangkan dan berpotensi serta berkualitas.
- 5) Mengembangkan kreatifitas keterampilan anak didik untuk mengekspresikan diri dalam berkarya seni.
- 6) Menciptakan suasana sekolah yang bernuansa agamis dan disiplin.

2. Waktu Pembelajaran

Hari Pembelajaran : Senin s.d sabtu
Jam Pembelajaran : 07.30 s.d 10.00 WIB

3. Gambaran Umum Aktivitas Sekolah

Anak-anak di Lembaga PAUD Al Amin Pringgondani Kab. Malang mulai kegiatan pembelajaran sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB dari hari Senin hingga Sabtu. Sebelum kegiatan dimulai kegiatan anak-anak adalah berbaris di halaman dengan tertib dengan dipimpin oleh salah satu anak dan menyanyikan lagu, kemudian anak masuk kelas dengan berhitung sesuai dengan urutan barisan anak kemudian anak masuk kelas dengan tertib.

Saat masuk kelas anak dengan tertib duduk dibangunkunya masing-masing. untuk mengondisikan anak dengan tertib guru mengajak anak untuk bertepuk yaitu “tepuk jari (sambil berhitung dengan menggunakan Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan

Bahasa Arab)”. Guru memulai pembelajaran yaitu kegiatan awal yang dilakukan \pm 30 menit yang terdiri dari kegiatan berdoa dan salam, berbagi dan bertanya, dan menyanyikan pembukaan. Pada kegiatan awal metode pembelajarannya menggunakan tanya jawab dan demonstrasi.

Mengucapkan salam “Assalamu’alaikum wr.wb” jawab anak “Wa’alaikumsalam wr, wb”. Berdoa dengan membaca doa sehari-hari yaitu doa sebelum belajar, doa untuk kedua orang tua, doa keselamatan dunia akhirat, doa iftitah dan membaca rukun islam. Kemudian anak Guru kelas menyapa anak dengan bernyanyi “Good Morning, everybody how are you?” kata guru kelas sambil menunjuk masing-masing anak, jawab anak “Just Fine”.

Kemudian anak diajak berdiri untuk berbaris didepan kelas untuk menghadap bendera, salah satu anak memimpin temannya sambil berseru “siap gerak, lencang kanan gerak, kepada sang merah putih hormat gerak, tegap gerak”. Kemudian pembacaan teks pancasila dipimpin salah satu temannya kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain, bu Santi mengajak anak untuk menyanyikan lagu wajib dengan judul “beramai-ramai ke laut atau dari sabang sampai merauke”.

Dan sambil mempresensi anak-anak yang hadir atau tidak hadir di sekolah, guru pun melakukan melalui bernyanyi yaitu:

Aku punya dua mata

Bisa ku tutup dan ku buka

Bila ku tutup gelap gulita

Bila ku buka lihat semua

Ada (menyebut masing-masing nama anak)

Kemudian menanyakan kepada anak “siapa temanmu yang tidak masuk?”, jawab anak-anak “(dengan menyebut temannya yang tidak hadir dikelas)”.

Sebelum memulai kegiatan inti \pm 60 menit, guru menanyakan tentang tema dan sub tema apa yang akan di ajarkan, tema dan sub tema disampaikan di awal pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita pengalaman pribadi anak didepan teman-temannya. Pada kegiatan bercerita ini hanya beberapa anak yang maju didepan kelas anak yang mau menyampaikan pengalaman pribadinya dan pada kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab antara guru dan anak-anak atau anak dan anak.

Pada saat kegiatan inti guru menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini yaitu kegiatan bermain diluar atau didalam kelas, mengerjakan LKS, mewarnai, menempel, menjiplak dan lain sebagainya kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Guru menjelaskan semua kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jelas kepada anak-anak, setelah menjelaskan anak diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah anak tersebut melaksanakan kegiatan yang pertama, anak dapat melanjutkan mengerjakan kegiatan yang kedua sampai selesai. Sedangkan kegiatan guru memotivasi anak untuk mengerjakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh guru.

Setelah kegiatan inti selesai anak dapat melaksanakan kegiatan istirahat yaitu dimanfaatkan untuk bermain diluar atau didalam kelas bebas terbimbing. Kegiatan istirahat ini dilakukan \pm 30 menit. Setelah kegiatan istirahat selesai anak berbaris dihalaman dan cuci tangan. Setelah masuk kelas kegiatan anak adalah makan dan minum, pada kegiatan makan dan minum anak diajak berdoa sebelum dan sesudah makan. Setelah kegiatan makan dan minum, kegiatan akhir \pm 30 menit yaitu kegiatan evaluasi dan tanya jawab kegiatan hari ini dan diskusi tentang kegiatan esok hari, do’a penutup dan salam.

Deskripsi pengamatan aktivitas kegiatan bermain matematika anak usia dini dengan Tema Pekerjaan di Lembaga PAUD Al Amin Malang. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan rancangan penelitian dengan melakukan kegiatan penelitian maka ditemukan data selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis. Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang akan

di analisis dari hasil pengamatan yaitu (1) kualitas lembaga sebagai aspek input satuan PAUD sesudah akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang dan (2) pengelolaan dan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi dalam aspek proses pada satuan PAUD sesudah akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang dan 3) Seberapa jauh manfaat yang dirasakan satuan PAUD terhadap hasil akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang.

Dari penelitian diperoleh beberapa temuan penelitian melalui catatan pengamatan (observasi), wawancara, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, yaitu: kualitas lembaga sebagai aspek input satuan PAUD sesudah akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang, pengelolaan dan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi dalam aspek proses pada satuan PAUD sesudah akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang, Seberapa jauh manfaat yang dirasakan satuan PAUD terhadap hasil akreditasi di Lembaga PAUD Al Amin Malang

Kualitas Lembaga Sebagai Aspek Input Satuan PAUD Sesudah Akreditasi

Berdasarkan hasil catatan lapangan didapat sejumlah temuan lapangan dengan menganalisis berdasarkan hasil observasi Dampak akreditasi terhadap mutu lembaga PAUD Al Amin. Dari hasil wawancara dengan pengelola lembaga PAUD Al Amin salah satu dampak dari akreditasi terhadap mutu pendidikan di lembaga tersebut terkait dengan input lembaga sesudah akreditasi yaitu tercatat pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah peserta didik 36 anak, tahun 2016/2017 jumlah peserta didik 33 anak (Sebelum akreditasi) pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2016 memperoleh SK akreditasi dengan status B. Dengan adanya status akreditasi makin menambah kepercayaan pada masyarakat sekitar terkait mutu pendidikan pada lembaga PAUD Al Amin sehingga secara bertahap ada kenaikan jumlah peserta didik di tahun ajaran 2017/2018 yaitu dengan jumlah peserta didik 38 anak dan tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah peserta didik 41 anak.

Hal ini juga sangat berpengaruh pada jumlah pendidik yang ada di lembaga PAUD Al Amin tersebut bertambah 2 guru. Dengan bertambahnya 2 pendidik di lembaga PAUD tersebut untuk memenuhi jumlah rasio antara pendidik dan peserta didik yang jumlah rasio pada lembaga PAUD sesuai dengan usia layanan 3-4 tahun yaitu 1:10, 4-5 tahun yaitu 1:12, dan 5-6 tahun 1:15. Sehingga dengan jumlah pendidik 5 orang dan peserta didik dengan jumlah 41 anak, dapat memenuhi jumlah rasio sesuai dengan standar kurikulum dalam tingkat nasional. Dengan adanya akreditasi juga lembaga dapat mengevaluasi diri lembaga dimana letak yang kurang dan yang perlu diperbaiki untuk kemajuan lembaganya di kemudian hari dan pemberian layanan yang maksimal untuk pendidikan anak usia dini.

Dengan terakreditasi lembaga PAUD Al Amin yang terletak di desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur masyarakat sekitar sangat mempercayakan untuk menitipkan anak-anak kepada lembaga PAUD Al Amin. Bahkan masyarakat diluar desa sumber bendo pun sekolah di lembaga PAUD Al Amin. Karena masyarakat merasa bangga dengan lembaga yang sudah terakredistasi dengan status B. Penjelasan oleh pengelola dan kepala sekolah lembaga PAUD Al Amin.

Pengelolaan dan Proses Pembelajaran yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembelajaran, dan Evaluasi dalam Aspek Proses pada Satuan PAUD Sesudah Akreditasi

Dari hasil observasi dan wawancara dalam pengelolaan dan proses pembelajaran diperoleh penjabaran sebagai berikut lembaga PAUD Al Amin memiliki Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STTPA) yang mengacu pada kurikulum permendikbud 137 dan 146 yang dibuat sesuai dengan kondisi lembaga dan capaian tingkatan usia anak yaitu 3-6 tahun dengan di petakan sesuai dengan tingkatan layanan berdasarkan usianya yaitu 3-4 tahun,

4-5 tahun, 5-6 tahun. Dengan mendokumentasikan semua kegiatan dalam bentuk foto dan rekaman yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yaitu merekam kegiatan dalam bentuk foto-foto kegiatan harian, mingguan, bulanan dan semester yang menjadi rujukan untuk melakukan pelaporan kepada orang tua atau wali murid peserta didik.

Struktur kurikulum dan penetapan kurikulum yang dibuat oleh lembaga sesuai dengan standar nasional sesuai dengan kurikulum 137 dan 146 yang dibuat sebagai acuan dalam kegiatan proses pembelajaran dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dilakukan peninjauan kurikulum yang dilakukan oleh dinas setempat yang dilakukan 1 tahun sekali dengan dilampirkan SK mengajar dan kurikulum, berita acara kegiatan dan disahkan oleh dinas. Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdapat Dokumen I yang berisi profil dan program-program pendidikan selama setahun dan Dokumen II yang berisi perangkat pembelajaran seperti Prota, promes, RPPM, dan RPPH yang disusun oleh tim penyusun kurikulum di lembaga.

Program PAUD memiliki materi pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan layanan menurut kelompok usia yang mengalokasikan waktu efektif perhari dan perminggu. Lembaga juga memiliki kalender pendidikan yang disusun oleh lembaga sendiri dengan mengacu pada kondisi dan program yang dibuat dan kalender tersebut disosialisasikan melalui penempelan kalender pendidikan di setiap kelas dan disosialisasikan kepada orang tua atau wali murid.

Program PAUD juga memiliki program kegiatan semester, bulanan, mingguan dan harian berupa rancangan Program Tahunan, Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan dan Harian. Selain program tersebut lembaga juga memiliki program Holistik Integratif yang dibuat secara tertulis. Pembelajaran program PAUD ini juga menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik untuk anak. Kegiatan pembelajaran terprogram menjadi 3 kegiatan pokok yaitu pembukaan, isi dan penutup dengan kelompok kecil heterogen. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran dilakukan setiap hari, minggu, bulan dan semester. Dengan menggunakan 5 teknik penilaian yaitu observasi, portofolio, unjuk kerja, hasil karya dan catatan anekdot.

Kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan di lembaga PAUD Al Amin Kepala sekolah dan 2 guru pendidikan Sarjana, 1 guru sedang menjalani proses kuliah S1 PIAUD dan 1 guru pendidikan SMA.

Sarana pendidikan lembaga PAUD Al Amin memiliki alat permainan edukatif di dalam dan di luar kelas dan memiliki buku-buku dan gambar-gambar. Sarana pendidikan yang lengkap dan beberapa mainan diperoleh dari bantuan dana BOP. Luas lahan lembaga PAUD Al Amin 280 m². Gedung milik sendiri status surat masih hibah sedangkan ruang dan halaman bermain yang aman, nyaman, bersih, sehat dan menarik sehingga peserta didik serasa di rumah sendiri dan menyenangkan.

Lembaga PAUD memiliki instalasi listrik, air, telpon dan internet yang memadai. Merumuskan visi, misi dan tujuan sesuai dengan kondisi sekolah dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan sekolah baik *input* maupun *output*. Memiliki rencana kerja tahunan dan lima tahunan yang sesuai dengan kondisi sekolah yaitu merancang tujuan, target sasaran, program/kegiatan, kebijakan dan pembiayaan yang jelas dan dilaporkan kepada dinas setempat setiap tahun tiga kali.

Lembaga PAUD memiliki jenis dan sumber pembiayaan dari orang tua/masyarakat, pemerintah berupa BOP. Penilaian dilakukan pelaporan kepada orang tua setiap semester dan pertahun.

Dari temuan hasil penelitian yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan pengelolaan dan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi dalam aspek proses pada satuan paud sesudah akreditasi. Terdapat peningkatan

dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, pengawasan pembelajaran dan evaluasi sudah terstruktur dengan baik dan sistematis, sehingga hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi yaitu mutu dan layanan yang akan perbaiki secara perlahan seluruh hasil pengawasannya dilaporkan kepada pihak terkait seperti dinas dan stakeholders sebagai bahan evaluasi secara holistik.

Manfaat yang dirasakan Satuan PAUD terhadap Hasil Akreditasi

Banyak sekali manfaat yang dirasakan satuan PAUD terhadap Hasil Akreditasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah dimasa mendatang.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah.
- c. Untuk pendorong motivasi dalam peningkatan kualitas sekolah secara gradual.
- d. Dapat meningkatkan kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.
- e. Dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah
- f. Dapat memotivasi guru untuk selalu meningkatkan diri dengan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik.
- g. Sebagai informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah
- h. Sebagai bukti bahwa lembaga mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan terhadap didinya bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh untuk menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional.
- i. Sebagai acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing.
- j. Sebagai bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional pendidikan di tingkat dinas.

Dari pembahasan di atas dari manfaat yang dirasakan satuan PAUD terhadap Hasil Akreditasi sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah dimasa mendatang, bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari temuan hasil penelitian Dampak Akreditasi Terhadap Mutu Pendidikan di Lembaga PAUD dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dengan terakreditasi lembaga PAUD Al Amin yang terletak di desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur masyarakat sekitar sangat mempercayakan untuk menitipkan anak-anak kepada lembaga PAUD Al Amin. Bahkan masyarakat diluar desa sumber bendo pun sekolah di lembaga PAUD Al Amin. Karena masyarakat merasa bangga dengan lembaga yang sudah terakredistasi dengan status B. Penjelasan oleh pengelola dan kepala sekolah lembaga PAUD Al Amin.

Temuan hasil penelitian pengelolaan dan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi dalam aspek proses pada satuan paud sesudah akreditasi. Terdapat peningkatan dalam menyiapkan perangkat

pembelajaran, pengawasan pembelajaran dan evaluasi sudah terstruktur dengan baik dan sistematis, sehingga hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi yaitu mutu dan layanan yang akan perbaiki secara perlahan seluruh hasil pengawasannya dilaporkan kepada pihak terkait seperti dinas dan stakeholders sebagai bahan evaluasi secara holistik.

Manfaat yang dirasakan satuan PAUD terhadap Hasil Akreditasi sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dan rencana pengembangan sekolah dimasa mendatang, bahan masukan untuk pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dan meningkatkan kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.

Bagi Guru Dapat memotivasi guru untuk selalu meningkatkan diri dengan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik setelah akreditasi. Dan informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Bagi Pengelola Lembaga dengan mudah mempromosikan dengan menunjukkan bukti bahwa lembaga dapat menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan terhadap didinya bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh untuk menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional. Bagi Orang Tua dapat membantu lembaga untuk mempromosikan lembaga PAUD dengan menyampaikan informasi terkait kualitas sekolah untuk mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral, dana, tenaga dan profesionalisme.. Bagi peneliti lanjutan karenan peneliti memiliki ruang lingkup dan keterbatasan dalam meneliti sehingga kedepan dalam meneliti perlu diteliti lagi tentang dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan di lembaga lebih luas lagi sesuai dengan mengacu 8 standar pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcaro., Jerome, S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BAN PAUD dan PNF. 2018. Data Akreditasi BAN PAUD dan PNF di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diunduh tanggal 1 Desember 2018 Pukul 04.55 WIB. <http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/index.php/chome/pencarian/>
- Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah Data Satuan Pendidikan (Satuan PAUD) Per Kabupaten/Kota : Kab. Malang. Diunduh tanggal 1 Desember 2018 Pukul 04.55 WIB. http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21_tkra.php?kode=051800&level=2
- Direktorat Tenaga Kependidikan. 2008. *Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Effendi., Sofian. 1995. *Unsur-unsur Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Satuan PAUD, <http://rastodio.com/wp-content/uploads/2009/08/Keppmendiknas-044-2002.pdf> (diakses 11 Februari 2011).
- Miles ., Matthew B. and Michael A. Huberman. 1994. *Qualitatif Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moleong., Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Patton., Michael Quinn. 1987. *Qualitatif Evaluation and Research Methods*. California: Sage Publication.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62, ayat 1.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Sagala., Syaiful. 2010. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis., Edward. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Ltd.
- Singarimbun., Masri. 1995. *Metode dan Proses Penelitian*. Jakarta: LP3ES.
- Sudjana.,Nana. 2005. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Satuan PAUD*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sudjana., Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Satuan PAUD*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Remaja Rosdakarya.
- Tilaar.,H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, ayat 25.